



RENCANA KERJA

BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2026



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
JL. GATOT SUBROTO NO.2 KEDIRI
TLP.(0361) 811171
2025



KATA PENGANTAR

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Tuhan Yang Maha Esa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Tahun 2026.

Dokumen ini membuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan periode 2025. Dokumen perencanaan ini sangat penting untuk mengetahui apa yang akan dilakukan dan apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sehingga dengan mengetahui hal tersebut dapat kami pedomani untuk perencanaan program/kegiatan pada tahap-tahap selanjutnya.

Kami sadar bahwa dokumen perencanaan ini belumlah sempurna, untuk itu saran yang membangun dari semua pihak baik formal maupun informal sangat kami perlukan agar dokumen perencanaan ini semakin sinergis dengan RPJPN, RPJPD, RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025-2029 dan dokumen perencanaan lainnya untuk mewujudkan Tabanan Aman Unggul Madani.



Tabanan, 28 Agustus 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srinadha Giri, S.E., M.M.

Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19740624 200604 1 010



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
SK PEMBENTUKAN TIM	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten.....	32
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	33
3.3 Program dan Kegiatan.....	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	42
4.1 Perencanaan Pendanaan	42
4.2 Indikator Kinerja	42
BAB V PENUTUP	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran dan Rencana Tindak Lanjut.....	47
 LAMPIRAN	
TABEL RENSTRA BPBD TAHUN 2025-2029	



DAFTAR TABEL

II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tabanan.....	7
	2.1 Capaian pengukruan SPM 2021-2024	13
	2.2 Capaian pengukruan IKD 2021-2024	14
	2.3 Capaian pengukruan IKU 2021-2024	14
	2.4 Capaian pengukruan IKP 2021-2024	15
II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.....	17
	2.5 Kejadian Bencana	17
	2.6 Sebaran rekontruksi dan rehabilitasi	17
	2.5 Data ASN pada BPBD	18
II.4	Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026 ..	28
	3.1 Visi, Misi RPJMD SB dan Tujuan PD	34
III.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Tabanan.....	5
IV.1	Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026 Kabupaten Tabanan... ..	42
	Kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana	42

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 230 Ayat 1 menyatakan daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyusun Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 sebagai dokumen strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Pemerintah Kabupaten Tabanan sangat berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Indonesia Tangguh Bencana (*Resilient*) untuk Pembangunan Berkelanjutan 2045. Perencanaan pembangunan telah diarahkan untuk adanya sinergisitas prioritas pembangunan pusat dan daerah. Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dengan baik.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2040, dimana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2). Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontingensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana

Perencanaan kebencanaan di Kabupaten Tabanan telah disusun sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 yang disenergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan kinerja tersebut telah mengamanahkan untuk menjadikan Tabanan sebagai kabupaten tangguh bencana dimulai dari desa

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan rasa aman masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Pelimpahan Kewenangan merupakan prasyarat mutlak untuk tercapainya pemerintahan yang efektif dan efisien. Keberanian Pemerintah Kabupaten/kota untuk melimpahkan sebagian kewenangan kepada OPD merupakan tantangan yang cukup berat seiring dengan tarik ulur berbagai kepentingan yang ada di dalamnya. Menjawab tantangan ini adalah tugas besar yang harus dilaksanakan, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah betul-betul merupakan wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta kerangka pendanaan daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda daerah dan rencana resmi daerah (RPJMD, RKPD, dan Renstra PD) dengan Rancangan Renja K / L dan Rancangan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu perencanaan pembangunan kebencanaan sudah mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top-Down (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Botom-Up (Bawah-Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, *Top Down* dan *Botom-Up* diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, mengacu kepada RKPD Kabupaten Tabanan, Renstra tahun 2025-2029, dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya dan hasil Forum OPD.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2026 adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional :

Landasan operasional penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- f. Peraturan daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029;
- g. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
- h. Surat Edaran Bupati Tabanan Nomor 900.1.1.2/8872/Bakeuda/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah TA 2026.
- i. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/262/01/HK/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai acuan dalam melakukan evaluasi hasil kinerja perangkat Daerah.

b. Tujuan

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan.
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026.
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 129 menyatakan “Hasil perumusan rancangan

awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: a. Pendahuluan;

b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

e. Penutup

Adapun isi ringkas atas Rancangan rencana kerja perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|--|
| Bab I. Pendahuluan | : | Pada bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan rancangan awal rencana kerja BPBD. |
| Bab II. Hasil Evaluasi
Evaluasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun Lalu | : | Pada bagian ini memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan, analisa laporan kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, revidi terhadap rancangan RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. |
| Bab III. Tujuan dan
Sasaran Perangkat
Daerah | : | Pada bagian ini memuat telaah terhadap kebijakan nasional, provinsi, kabupaten, telaah tujuan dan sasaran renja, program dan kegiatan. |
| Bab IV. Rencana
Kerja dan Pendanaan
Perangkat Daerah | : | Pada bagian ini memuat rencana kerja, indikator kinerja, dan kerangka pendanaan kebencanaan. |
| Bab V. Penutup | : | Pada bagian ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut |

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dilaksanakan, diukur, dan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis capaian atas rencana kerja tahun 2023-2024 sebagai berikut :

- a. Realisasi fisik program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan pada BPBD Kabupaten Tabanan tahun 2024 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan yaitu :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sudah terealisasi secara fisik 100% dan keuangan sebesar 85,33%
- Program penanggulangan bencana sudah terealisasi secara fisik 100% dan keuangan sebesar 84,88%
- Kedua program sudah terpenuhi target kinerja output atau 100% dan terdapat efisiensi atau penghematan di kedua program sebesar 14,21%.

- b. Realisasi program dan kegiatan penanggulangan bencana yang melebihi target output adalah pada pelayanan kebencanaan yang dimanahkan dalam yaitu pelayanan sosialisasi mitigasi bencana yang awalnya di aparat desa dan siswa SMP, sekarang sudah tersosialisasikan ke dunia usaha (perbankan, klinik, yayasan) dan sekolah dasar sehingga kapasitas masyarakat umum dan anak sekolah semakin kuat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.

- c. Faktor-faktor penyebab tercapainya target output program dan kegiatan adalah kolaborasi Tim BPBD dengan instansi terkait dalam komitmen meningkatkan ketahanan daerah dan menurunkan indeks risiko bencana karena 133 desa teridentifikasi rawan bencana. Sedangkan factor penghambat yang masih dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang bersertifikat kebencanaan dalam kaji cepat dan analisis dampak kerugian bencana sebagai dasar perencanaan kebencanaan.

- d. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil evaluasi pelaksanaan kinerja program dan kegiatan tahun 2025 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan yang tersaji dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel : II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Tabanan

OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

[illegible]

[illegible]

Rencana Kerja

[illegible]

				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Sumber :BPBD, 2024

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan seecara berkala telah mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan yang dimanahkan yaitu :

- a. Penerapan dan Pencapaian SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di sub urusan bencana. Jenis pelayanan dasar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam peraturan tersebut adalah : 1). Pelayanan informasi rawan bencana, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 3). Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pengukuran kinerja SPM dalam aplikasi Kementerian Dalam Negeri : spm.bangda.kemendagri.go.id dan nilainya dikeluarkan oleh Ditjen Pembangunan Daerah. Tahun 2021-2024 capaian kinerjanya seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Capaian pengukuran SPM 2021-2024

SPM	Indikator	Reaalisasi / tahun (%)			
		2021	2022	2023	2024
Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	Rata-rata persentase capaian SPM sub urusan bencana	98,9	98,0	99,8	100,0

Sumber : Laporan SPM, 2024

- b. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capain kinerja ini mendukung capaian indikator kinerja tujuan Renstra BPBD dan indikator RPJMD SB yaitu indeks risiko bencana. Adapun kinerja penurunan indikes risiko bencana seperti berikut ini.

Tabel 2.2 Capaian pengukuran IRB 2021-2024

Sasaran	Indikator	Reaalisasi / tahun (%)			
		2021	2022	2023	2024
Penurunan risiko bencana	Indeks risiko bencana	154.0	153,3	139,4	122,3

Sumber : Laporan Tahunan, 2024

- c. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capain kinerja ini mendukung capaian indikator kinerja utama Renstra BPBD yaitu : 1). Prosentase waktu tanggap kebencanaan, dan 2), Nilai LKjIP.



Adapun kinerjanya seperti berikut ini.

Tabel 2.3 Capaian pengukuran IKU 2021-2024

Sasaran	Indikator	Reaalisasi / tahun			
		2021	2022	2023	2024
Pengurangan risiko bencana	Prosentase waktu tanggap bencana	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	B	BB	BB	BB

Sumber : LKjIP, 2024

d. Capaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian indikator kinerja dua program sudah 100% Hasil analisis sebagai berikut :

- persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD sudah terlaksana 100% dalam menunjang kelancaran aministrasi dan kelancaran pelayanan publik.
- prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana yang sudah terealisasi 100% dengan waktu tanggap bencana 24 jam 7 hari kerja. Hasil pengukruan kinerja seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Capaian pengukuran IKP 2021-2024

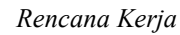
Sasaran	Indikator	Realisasi / tahun (%)			
		2021	2022	2023	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100	100	100	100
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	100	100	100	100

Sumber : LKjIP, 2024

Adapun hasil pengukuran pelayanan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah disajikan seperti tabel II.1 berikut ini

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

[illegible]

[illegible]

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan mencakup 10 (sepuluh) kecamatan. Hasil perumusan isu-isu staretgis yang dihadapi seperti berikut ini.

- 1. Terkait dengan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, BPBD selalu siaga melayani masyarakat yang mana kantor terbuka 24 jam selama 7 hari, bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kebencanaan bisa melalui lewat telepon BPBD (0361) 811171. Dinamika organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tabanan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 dan tanggal 17 Januari 2023 telah dikukuhkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana dari tipe B ke tipe A dengan perubahan struktur yang disajikan per 17 Juli 2025 seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Data ASN pada BPBD

Uraian	Jumlah ASN		Keterangan setelah tipe A
	2021 (TipeB)	2025 (TipeA)	
Struktural	5 orang	6 orang	Eselon IIb, IIIb, IVa
Fungsional Teknis	0 orang	0 orang	Belum ada
Fungsional Umum	15 orang	7 orang	Pelaksana di sekretariat dan bidang
Tim Reaksi Cepat (TRC)	35 orang	31 orang	Staf lapangan non ASN
PPK	0 orang	21 orang	TMT 17 Juli 2025
Tenaga Kontrak	12 orang	11 orang	Staf administrasi non ASN

Sumber : DUK, 2025

- 2. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan yang tertuang dalam RPJMD SB dan Renstra PD yang masih dirumuskan untuk dipecahkan tahun 2026 antara lain:



No	Isu-Isu di RPJMD SB (Bab IV)	Isu-Isu di Renstra PD (Bab III)	Isu-Isu di Ranhir PD (Bab II)
1	Aspek geografi : - wilayah Tabanan sebagai daerah rawan bencana (potensi bencana longsor, tsunami, gempa, dan putting beliung) - pencegahan, penanganan bencana, dan pasca bencana untuk kesiapsiagaan dan meminimalisir kerugian akibat bencana	Pengurangan resiko bencana menjadi prioritas untuk meningkatkan ketahanan daerah rawan bencana	- Pengurangan risiko bencana menjadi prioritas dalam meningkatkan ketahanan daerah rawan bencana - Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana didorong untuk menjadikan desa tangguh bencana
2	Aspek perumahan rakyat : identifikasi rumah terdampak bencana dan terkena dampak program pemerintah	Sinergitas dan kolaborasi pemangku kepentingan penanggulangan bencana masih belum optimal	Tingginya kerugian pemukiman masyarakat dan fasilitas umum akibat dampak bencana
3	Aspek trantibun : - pelayanan dasar SPM masih ketendala SDM dan sapras penunjang - belum semua desa rawan bencana mendapat sosialisasi kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat	Peningkatan kapasitas kebencanaan belum di 133 desa rawan bencana	Pelayanan wajib dasar yang diamanahkan SPM sub urusan bencana belum tuntas paripurna
4	Aspek komunikasi dan informasi : kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola teknologi informasi	- Masih kurangnya atau terlambatnya informasi terkait dengan kebencanaan - Sumber daya manusia aparatur penanggulangan bencana belum semuanya memiliki kompetensi teknis	- Kurangnya sarana kerja berbasis teknologi informasi mendukung update pelayanan kebencanaan - Belum adanya Pejabat Fungsional Analis Kebencanaan dan kurangnya SDM yang berkompetensi teknis

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelayanan menemukan permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi anatra lain :

- Terbatasnya jumlah aparatur (Pejabat Fungsional dan Funsgional Umum) di BPBD sehingga pendistribusian tugas-tugas/ pekerjaan banyak yang rangkap

tugas sehingga menghambat penyelenggaraan tugas, fungsi, dan layanan kebencanaan 24 jam 7 hari kerja.

- Terbatasnya sarana dan prasarana layanan kebencanaan seperti belum memiliki gudang logistik, minimnya peralatan data, informasi, komunikasi, dan pelaporan bencana yang berbasis digital. Begitu juga sarana operasional tanggap darurat bencana.
 - Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan kegiatan di BPBD, hal ini disebabkan karena terbatasnya APBD Kabupaten Tabanan.
 - Kompetensi SDM aparatur (NS dan Non PNS) masih rendah dalam pengetahuan dan ketrampilan teknis kebencanaan dan kepemilikan sertifikat kompetensi kebencanaan.
4. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan terhadap capaian program bahwa pelaksanaan seluruh program yang telah dilaksanakan sangat berdampak positif atas pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak bencana, sehingga masyarakat bisa lebih baik dan hidup layak dalam melaksanakan kehidupannya.
5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan besar yang teridentifikasi dalam pelayanan kebencanaan adalah luasnya daerah rawan bencana yang tersebar di 133 desa dengan (sembilan) jenis ancaman bencana sehingga memerlukan manajemen tata kelola pemerintahan yang mendukung kebijakan mitigasi bencana agar masyarakat di daerah rawan bencana menjadi masyarakat siaga dan tangguh bencana.

6. Tindak lanjut atas rekomendasi DPRD Kabupaten Tabanan dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

a. Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam usulan perencanaan pembangunan pada Tahun 2026 akan dilaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan instansi terkait dan kelompok masyarakat pemerhati kebencanaan melalui Forum OPD, dan usulan dari masyarakat lewat Musrenbang tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Kabupaten, hasil dari musrenbang tersebut akan disampaikan oleh Bappeda kepada OPD terkait apa saja yang menjadi permasalahan di masyarakat.

b. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2024, telah berhasil dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penanggulangan

Bencana. Untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung, disamping itu pula perlu dibangunnya Kantor BPBD yang layak agar dapat memberikan pelayanan yang prima, karena kantor saat ini kurang layak untuk operasional BPBD.

- c. Urusan wajib dasar sub urusan bencana direkomendasikan oleh DPRD untuk meningkatkan kapasitas masyarakat rawan bencana dengan melakukan sosialisasi, komunikasi, edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat rawan bencana dan menguatkan satuan pendidikan rawan bencana. Pemenuhan hak dasar warga sesuai SPM bencana terus dilakukan sehingga pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak bencana.
- d. Urusan pelayanan administrasi pemerintahan diarahkan dalam akselerasi sistem tata kelola pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana sehingga terbangun budaya kerja respon time 24 jam 7 hari kerja dalam pelayanan kebencanaan.

2.4. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 bertipe A telah melakukan penyempurnaan rencana kerja agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyusun perencanaan kinerja jangka pendek (Renja) sudah disinergiskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah (Renstra) sehingga amanah Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Semesta Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas BPBD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mensinkronkan rancangan akhir Renja dengan ranhir RKPD sehingga penjabaran RPJMD Semesta Berencana sebagai berikut :

- | | |
|--------|---|
| Visi | : Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan dalam Tabanan Era Baru :
Aman, Unggul. Madani (AUM) |
| Misi | : 5. Setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi dan berkeadaban |
| Tujuan | : 9. Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim |

Indikator : Indeks Risiko Bencana. Target tahun 2026 adalah 119,68.

Sasaran : 1. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana

Indikator : Indeks ketahanan daerah. Target tahun 2026 adalah 0,64.

Sasaran : 2. Meningkatnya kualitas layanan SPM sub bencana

Indikator : Capaian layanan SPM sub urusan bencana. Target tahun 2026 adalah 100%.

a. Proses Usulan Program dan Kegiatan Prioritas

Proses perencanaan dilakukan sesuai kaidah perundang-undangan dan mengikuti surat edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/3840/Bappeda dalam menjabarkan Renstra ke dalam rancangan akhir rencana kerja dengan dilakukan analisis program dan kegiatan prioritas yang diperoleh dari hasil musrenbang, usulan masyarakat langsung ke BPBD, arahan dewan dalam pemenuhan hak dasar warga.

b. Kesesuaian Usulan dengan Isu Strategis

Tim Penyusun Rencana Kerja PD telah melakukan diskusi dan perumusan dalam penyelarasan usulan program prioritas dalam menjawab isu strategis yang dihadapi di tahun 2026.

Tabel Program dan kegiatan Prioritas

No	Program/Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dok
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 Laporan



			SKPD	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	2	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
3	Penyediaan bahan logistic kantor	3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
5	Penyediaan Bahan/material	5	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket
6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah		Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan
G	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100 %
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 Unit
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase penanganan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%



A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota		Prosentase pelayanan informasi mitigasi bencana di daerah rawan bencana	100%
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	1	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	70 Orang
B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Becana		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%
1	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	1	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	3 Desa
2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	2	Jumlah warganegara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 orang
3	Penyusunan Rencana Kontijensi	3	Jumlah Dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi	0 Dokumen
4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	4	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 Orang
C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1	Jumlah SK penetapan status darurat bencana dan SK PDB yang ditetapkan palig lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporankaji cepat	2 dokomen
2	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korrban Bencana Kabupaten/Kota	2	Jumah korban yang berhasil diketemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencan	20 orang
D	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dokumen
1	Koordinasi penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	1	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	1 dokumen
2	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	2	Jumah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah

a. Telaah terhadap kebijakan pemerintah pusat

Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 mengamanahkan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab pada penanggulangan bencana. Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 mengamanahkan penanggulangan bencana sebagai urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional di bawah koordiansi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana terus berkoordinasi sehingga program kerja sinergis dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) tahun 2020-2044.

b. Telaah terhadap kebijakan pemerintah provinsi

Kebijakan strategis pemerintah Provinsi Bali terutama pada BPBD Provinsi Bali sudah dilakukan sinkronisasi baik melalui forum perangkat daerah, rapat-rapat koordinasi, rapat-rapat teknis, dan kolaborasi dalam pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana sesuai kewenangannya.

Program dan kegiatan prioritas yang sinergis sesuai prioritas daerah yang diukur melalui pemenuhan SPM urusan wajib dasar, karena pemenuhan unsur SPM kabupaten/kota akan menjadi ukuran penilaian provinsi yang dikeluarkan oleh BNPB. BPBD Provinsi secara berkala melakukan binwas kebencanaan dalam sinergisitas program kebencanaan dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

c. Telaah terhadap kebijakan pemerintah kabupaten

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik.

Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan menjadi dasar pilihan tindakan yang dapat diambil oleh pemangku kepentingan untuk meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Tabanan dengan

berdasarkan kajian risiko di Kabupaten Tabanan. Ada lima bidang prioritas dan dua bidang penunjang yang menjadi acuan pembangunan yaitu :

1. Bidang pangan, sandang, papan
2. Bidang pendidikan dan kesehatan
3. Bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan
4. Bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya
5. Bidang pariwisata
6. Bidang infrastruktur fisik dan digital
7. Bidang lingkungan hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan teknis yang hendak dicapai pada Tahun 2026 adalah : Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Sedangkan tujuan administratif adalah Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Sasaran 1 :

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh BPBD dengan Sasaran : 1). Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana, dan 2). Meningkatnya kualitas pelayanan SPM sub bencana melalui 1 program yaitu Program Penanggulangan Bencana dengan 4 (empat) kegiatan.

Sasaran 2 :

Sasaran untuk mencapai tujuan Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Sedangkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tabanan adalah :

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Dalam Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)",

MISI : misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau Langkahlangkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2025-2029, yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan)atas: Pangan, Sandang, dan Papan; Pendidikan dan Kesehatan; jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, seni dan Budaya; dan Pariwisata, maka Misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah:

- Misi 1: Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri
- Misi 2 : Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
- Misi 3 : Mewujudkan keadilan social melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat , termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
- Misi 4 : Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
- Misi 5 : Setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hokum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi dan berkeadaban.
- Misi 6 : Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia

Adapun penjabaran atas visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disinkronisasikan dengan Renstra perangkat daerah 2021-2026 adapun sinkronisasi RPJMDSB dengan Renstra BPBD seperti berikut ini.

Tabel 3.1 Misi, Tujuan, Sasaran

RPJMD			RENSTRA	
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
5. Setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hokum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi dan berkeadaban	1. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, melalui peningkatan pemanfaatan teknoogi informasi	8. Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 13. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1. Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1.1 Meningkatnya ketahan daerah terhadap bencana 1.2 Meningkatnya kualitas layanan SPM bencana 2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku Tahun 2026 diusulkan 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Program Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2026 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini direncanakan akan dapat mendukung perencanaan kinerja yang akuntabel dan mendorong kelancaran administrasi keuangan dan pelayanan publik.
2. Program Penanggulangan Bencana. Program ini direncanakan akan mendukung pencapaian kinerja indeks ketahanan daerah dan pencapaian SPM untuk kinerja BPBD dalam pelayanan pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana, sehingga semua usulan dan pengaduan masyarakat dapat terlayani dalam mendukung misi kelima RPJMD SB.

Sedangkan kegiatan BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2026 meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umm Perangkat Daerah
4. Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
9. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
10. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Hasil kajian teknokratik telah disusun rumusan program dan kegiatan prioritas dengan target kinerja dan kebutuhan dananya yang disajikan seperti berikut ini.



Tabel III.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN TABANAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01	BPBD								
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	BPBD Kab. Tabanan	100%	5.724.642.840			100%	4.621.000.000
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	BPBD Kab. Tabanan	5 Dokumen	5.000.000	APBD		3 Dokumen	12.000.000
1.05.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	3 Dokumen	3.000.000	APBD		2 Dokumen	7.000.000
1.05.01.2.01. 07	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	2 Laporan	2.000.000	APBD		1 Laporan	5.000.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	BPBD Kab. Tabanan	100%	4.304.658.000	APBD		100%	2.895.600.000



1.05.01.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kab. Tabanan	15 Orang	4.302.158.000	APBD	Estimasi ada penambahan PNS	36 Orang	2.887.600.000
1.05.01.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD Kab. Tabanan	2 Laporan	2.500.000	APBD		2 Laporan	8.000.000
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	BPBD Kab. Tabanan	100%	83.419.600	APBD		100%	235.500.000
1.05.01.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	1 Paket	2.935.400	APBD		1 Paket	5.000.000
1.05.01.2.06. 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	1 Paket	2.495.200	APBD		1 Paket	6.000.000
1.05.01.2.06. 04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	1 Paket	27.995.000	APBD		1 Paket	45.000.000



1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BPBD Kab. Tabanan	2 Paket	5.000.000	APBD		2 Paket	16.000.000
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	3 Paket	14.000.000	APBD		3 Paket	17.000.000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Kab. Tabanan	2 Laporan	25.994.000	APBD		2 Laporan	140.000.000
1.05.01.2.06.01.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPBD Kab. Tabanan	4 Dokumen	5.000.000	APBD		4 Dokumen	6.500.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	BPBD Kab. Tabanan	100%	60.670.200	APBD		100%	140.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel tersedia	BPBD Kab. Tabanan	1 unit	39.783.600				50.000.000
1.05.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	1 unit	29.886.600	APBD		8 unit	90.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	BPBD Kab. Tabanan	100%	1.156.897.000	APBD		100%	1.137.900.000
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	BPBD Kab. Tabanan	150 lembar	2.500.000	APBD		150 lembar	2.900.000



1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik yg disediakan	BPBD Kab Tabanan	3 Laporan	32.000.000	APBD		3 Laporan	35.000.000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	BPBD Kab Tabanan	12 Laporan	1.122.397.000	APBD		12 Laporan	1.100.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	BPBD Kab Tabanan	100 %	104.998.040	APBD		100 %	200.000.000
1.05.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau laporan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	BPBD Kab Tabanan	12 unit	79.992.240	APBD		12 unit	120.000.000
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	BPBD Kab. Tabanan	16 unit	24.998.800	APBD		16 unit	80.000.000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	Kab. Tabanan	100%	465.000.000	APBD		100%	980.000.000
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tabanan	100%	25.000.000	APBD		10 Kecamatan	45.000.000



1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan Soisalisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	Kab. Tabanan	60 Orang	25.000.000	APBD		60 Orang	45.000.000
-----------------	---	---	--------------	----------	------------	------	--	----------	------------

1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Becana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Kab. Tabanan	100%	105.000.000	APBD		100%	525.000.000
1.05.03.02.02	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab. Tabanan	50 orang	45.000.000	APBD		50 orang	120.000.000
1.05.03.2.02.06	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan atau kawasan-kawasan straetgis kabupaten/kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiasiagaan menghadapi bencana	Kab. Tabanan	2 Desa	30.000.000	APBD		3 Desa	125.000.000
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	Kab. Tabanan	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	200.000.000



1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam penegndalian operasi darurat bencana (per jenis) kabupaten/kota	Kab. Tabanan	100 orang	30.000.000	APBD		100 orang	80.000.000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	Kab. Tabanan	100%	305.000.000	APBD		100%	310.000.000

1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase respon penanganan darurat bencana	Kab. Tabanan	100 %	295.000.000	APBD		100 %	300.000.000
1.05.03.2.03.04	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korrban Bencana Kabupaten/Kota	Jumah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	Kab. Tabanan	20 orang	10.000.000			0%	10.000.000
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	Kab. Tabanan	1 dokumen	30.000.000	APBD		1 dokumen	90.000.000
1.05.03.2.02.007	Penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	Kab. Tabanan	1 dokumen	25.000.000			1 dokumen	85.000000



1.05.03.2.04.009	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	1 dokumen	5.000.000			1 dokumen	5.000.000
	Jumlah				6.189.642.840				5.601.000.000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Perencanaan Pendanaan

Dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditentukan akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan serta pendanaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam mengemban misi pertama yaitu Menwujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman) akan dapat diwujudkan dengan kerjasama kolaboratif pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Hasil rumusan dalam merencanakan prorgam dan kegiatan priorritas, maka direncanakan pendanaan di tahun 2026 dirancang bersumber dari APBD Kabupaten dan didukung dari APBN, CSR (BUMN dan swasta), dan APBD Provinsi untuk mendukung pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana.

Sesuai hasil Forum OPD dan desk dalam penyelarasan program dan kegiatan maka pada rencana kerja BPBD tahun 2025 ditambahkan satu kegiatan baru yang ditangani Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi yang menangani pasca bencana. Datanya disajikan seperti tabel berikut ini.

Table 4.1 Kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana

No	Kegiatan 2022-2023	Kegiatan 2025-2029
1	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3	Pelayanan peneylamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan peneylamatan dan evakuasi korban bencana
4	-	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana

Sumber : Forum OPD, 2025

4.2 Indikator Kinerja

Sesuai amanah peraturan kinerja, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah merumuskan sinergisitas program, kegiatan, sub kegiatan dengan indikator dan targetnya dapat terukur secara berkala. Dukungan anggaran di masing-masing sub kegiatan sudah diselaraskan dengan hasil musrenbang, Forum OPD, dan kajian teknokratik. a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah pada RPJMD SB

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telh dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator



Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang di harapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. IKU Pemkab pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama pada RPJMD

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan dalam Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani									
Misi 5 : Setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hokum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi dan berkeadaban									
Tujuan, Sasaran	Indikator	Awal RPJMD	Target Capaian						Sat
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan 1. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien melalui peningkatan Kompetensi ASN	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
Sasaran 9 Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	37. Indeks Risiko Bencana	122,13	119,68	117,28	114,93	112,63	110,38	108,17	Angka
Tujuan 2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	B	B	B	BB	BB	BB	BB	-
Sasaran 14 Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah	BB 72,85	BB 73,85	BB 74,85	BB 75,85	BB 77,05	BB 79,01	A 80,01	-

Sumber : RPJMD SB Tahun 2025-2029

b. Indikator Kinerja Daerah

Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang di harapkan tercapai pada akhir periode RPJMD yang



dituangkan pada Bab IV tabel 4.3 indikator 11 yang sudah dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya seperti berikut ini.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan dalam Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani									
Misi 5 : Setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hokum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi dan berkeadaban									
Aspek	Indikator	Awal RPJMD	Target Capaian						Sat
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I. Geografi dan Demografi	11. indeks risiko bencana	122,13	119,68	117,28	114,93	112,63	110,38	108,17	Angka
	12 Indeks ketahanan daerah	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	Angka

Sumber : RPJMD SB Tahun 2025-2029

c. Indikator Kinerja Tujuan

Penjabaran atas visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana yang menjadi urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dirumsukan tujuan jangka menengah untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan organisasi. Adapun indikator tujuan disajikan seperti berikut ini.

Tujuan	Indikator PD	Awal Rentra	Target Capaian						Sat
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	122,13	119,68	117,28	114,93	112,63	110,38	108,17	Angka
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LKjIP Peragkat Daerah	BB 72,85	BB 73,85	BB 74,85	BB 75,85	BB 77,05	BB 79,01	A 80,01	-

Sumber : RPJMD SB Tahun 2025-2029

d. Indikator Kinerja Utama BPBD

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk Kegiatan-kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Program, Kegiatan pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan

dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Tabanan adalah:

1. Indeks ketahanan daerah;
2. Capaian SPM sub urusan bencana
3. Nilai LKjIP BPBD; seperti berikut ini.

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun 2024	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi RPJMD
				Thn 2025	Thn 2026	Thn 2027	Thn 2028	Thn 2029	Thn 2030
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks ketahanan daerah (angka)	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69
	Meningkatnya kualitas layanan SPM sub urusan bencana	Capaian layanan SPM sub urusan bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP BPBD (angka)	BB 72,85	BB 73,85	BB 74,85	BB 75,85	BB 77,05	BB 79,01	A 80,01

Keterangan : Indeks Ketahanan Daerah merupakan penilaian 71 indikator ketangguhan daerah menghadapi bencana yang dinilai oleh BNPB setiap tahunnya.

Adapun skala ketangguhan daerah yaitu skala 0-0,4 berarti ketahanan rendah, skala 0,40,8 berarti ketahanan sedang, dan skala 0,8-1,0 berarti ketahanan tinggi.

e. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Hasil rumusan dari penyempurnaan rancangan awal yang dari hasil Forum OPD, telaah pokok-pokok pikiran dewan, dan musrenbang dirancang dalam rincian program, kegiatan dan sub kegiatan dapat kami tuangkan dalam Tabel IV.1 dibawah ini.



Tabel IV.1 Progam. Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikatif

No	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Forum	Pagu PPAS
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	5.900.327.800	5.724.642.840
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dokumen	11.000.000	5.000.000
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	2 Dokumen	6.500.000	3.000.000
b	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen LKjIP	1 Laporan	4.500.000	2.000.000
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	4.310.000.000	4.304.658.000
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	34 Orang	4.303.000.000	4.302.158.000
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Aset yang tersedia	2 Laporan	7.000.000	2.500.000
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	219.500.000	83.419.600
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik tersedia	1 Paket	4.000.000	2.935.400
b	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yg tersedia	1 Paket	4.000.000	2.495.200
c	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic yang disediaksn	1 Paket	40.000.000	27.995.000
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	2 Paket	14.000.000	5.000.000
e	Penyediaan Bahan/material	Jumlah paket bahan yang disediakan	3 Paket	15.500.000	14.000.000
f	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	2 Laporan	136.000.000	25.994.000
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan arsip dinamis tersedia	4 Dokumen	6.000.000	5.000.000
4	Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	110.000.000	60.670.200
a	Pengadaan mebel	Jumlah unit mebel tersedia	2 set	40.000.000	39.783.600
b	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin tersedia	8 unit	70.000.000	29.886.600
5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa oenunjnag urusan pemerintah daerah	100%	1.066.444.800	1.156.897.000
a	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan surat menyurat	12 laporan	2.500.000	2.500.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia	3 Laporan	32.000.000	32.000.000



c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor tersedia	12 Laporan	1.031.944.800	1.122.397.000
6	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100 %	183.383.000	104.998.040
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	12 unit	113.383.000	79.992.240
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Output: Jumlah peralatan dan mesin terpelihara	16 unit	70.000.000	24.998.800
A	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase layanan penanggulangan bencana yang diberikan	100%	715.000.000	465.000.000
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Persentase pelayanan informasi mitigasi bencana di daerah rawan bencana	100%	40.000.000	25.000.000
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi kebencanaan	60 Orang	40.000.000	25.000.000
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	290.000.000	105.000.000
a	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 orang	100.000.000	45.000.000
b	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan atau kawasan-kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Desa	120.000.000	30.000.000
c	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	1 Dokumen	70.000.000	0
d	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam penegndalian operasi darurat bencana (per jenis) kabupaten/kota	100 orang	30.000.000	30.000.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	290.000.000	305.000.000
a	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SK PDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam hasil	100 %	10.000.000	295.000.000



		dokumen laporan kaji cepat			
b	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	0%	10.000.000	10.000.000
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dokumen	80.000.000	30.000.000
a	Koordinasi penanganan pasca bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	1 dokumen	5.000.000	25.000.000
b	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	5.000.000	5.000.000
	Jumlah			6.615.327.800	5.601.000.000

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Rencana Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pembangunan tahunan dan penyusunan laporan kinerja.
- b. Dokumen ini memuat indikator yang dijadikan tolok ukur evaluasi kinerja yaitu tolok ukur capaian 2 indikator kinerja utama pemerintah daerah, 2 indikator kinerja daerah, 2 indikator kinerja tujuan, 3 indikator kinerja utama perangkat daerah, 2 indikator kinerja program PD, dan 10 indikator kinerja kegiatan PD.
- c. Permasalahan yang menjadi penanggulangan bencana yang belum mendapat anggaran, diprioritaskan pelaksanaannya dengan dukungan anggaran dari APBD Provinsi, ABPN, dan CSR dari pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

5.2 Saran dan Kaidah Pelaksanaan

Pengendalian dan evaluasi atas perencanaan kinerja akan lebih berhasil guna dengan adanya penjabaran dan rencana aksi berjenjang sehingga semua program dan kegiatan dapat menghasilkan manfaat lebih optimal.

Kaidah pelaksanaan yang telah dirumuskan dan akan ditempuh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPBD di tahun 2026 memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab permasalahan kebencanaan sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam membangun daerah dengan perencanaan :

- a. Mengusulkan dan menyesuaikan peta jabatan BPBD untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan BPBD.
- b. Mengusulkan dukungan pemenuhan parameter pencapaian indikator kinerja daerah, IKU pemerintah daerah urusan bencana, dan IKU perangkat daerah.
- c. Mengusulkan aparatur untuk mengikuti peningkatan kompetensi baik bagi pejabat struktural, fungsional umum, dan pegawai layanan Pusdalops dan Tim Reaksi Cepat Bencana untuk meningkatkan indeks pemberdayaan manusia (IPM).



Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srinadha Giri, S.E., M.M.

Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19740624 200604 1 010



Lampiran 1

Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026

a. Program

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Penanggulangan bencana	Meningkatnya penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana	Presentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	100%
Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya pelayanan administrasi dan pelayanan publik perangkat daerah	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%

b. Kegiatan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Klinerja
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Meningkatnya pengetahuan mitigasi bencana masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 kecamatan
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Meningkatnya layanan penanganan bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kaji cepat pasca bencana	Prosentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 dok
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan yang akuntabel	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%
Administrasi umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Meningkatnya ketersediaan BMD yang membantu peningkatan kinerja perangkat daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Meningkatnya pelayanan publik perangkat daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya BMD yang layak operasional mendukung pelayanan kebencanaan	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	100%
---	---	--	------

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kiinerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkanya kualitas perenanaan kinerja BPBD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	3 dokumen
Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Meningkatnya ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja BPBD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya pelayanan gaji dan tunjangan meunjang kienrja pegawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	35 Orang/ bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Meningkatnya kualitas laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menngkatnya penyediaan komponen instalai listrik untuk penerangan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
Penyediaan peralatan rumah tangga	Meningkatnya ketersediaan peralatan rumah tangga mendukung pelayanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Penyediaan bahan logistik kantor	Meningkatnya ketersediaan logistik untuk operasional kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya keetrseediaan barang cetakan dan foto copy dokumen mendukung layanan administrasi	tersedianya barang cetak dan penggandaan	2 Paket
Penyediaan Bahan/material	Meningkatnya ketersediaan bahan material mendukung operasional kinerja	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Meningkatnya sinkronisasi progam prioritas pusat dan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan



Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Meningkatnya tata kelola arsip perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dok
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Meningkatnya sarana kerja operasional mendukung pelayanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 unit
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Meningkatnya ketersediaan materi mendukung layanan administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya ketersediaan listrik, air, dan telepon menunjang pelayanan publik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Meningkatnya kinerja aparatur non ASN dalam pelayanan administrasi dan publik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Meningkatnya dukungan sarana operasional dalam mobilitas kinerja pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Meningkatnya peralatan kerja yang layak operasional	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 unit
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Meningkatnya upaya mitigasi bencana secara tatap muka dan media elektronik / medsos di daerah rawan bencana	Jumlah orang yg mendapat sosialisasi kebencanaan	133 Orang
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Meningkatnya ketangguhan desa di daerah rawan bencana	Jumlah kawasan yang mendapat pemahaman kebencanaan	2 Desa
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Meningkatnya warga negara rawan bencana yang mendapatkan peningkatan pengetahuan dan simulasi bencana untuk siaga bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 orang
Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan warga negara menghadapi bencana	Jumlah warga negara yg mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya respon time layanan tanggap bencana	Persentase terlaksananya tim respon cepat penanganan darurat bencana	100 %



Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana	Jumah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	9 orang
Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten/kota	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sector berdasarkan RP3K kabupaten / kota yag dilegalkan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sector berdasarkan RP3K kabupaten / kota yag dilegalkan	1 Dokumen
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana aksi penerapan SPM sub urusan bencana di Kabupaten Tabanan	Jumah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen



Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srinadha Giri, S.E.,M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740624 200604 1 010



Lampiran 2 : Tabel																		
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025-2029																		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Akhir Tahun 2030			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
a	b	c	d	e	f	g	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1. Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Meningkatnya ketahanan Daerah Terhadap Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase layanan penanggulangan bencana yang diberikan (%)	100	100	100	547.000.000	100	668.000.000	100	981.000.000	100	1.106.000.000	100	883.500.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase pelayanan informasi mitigasi bencana di daerah rawan bencana (%)	100	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	185.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.01.003	Sub Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana sampai dinyatakan sah dan legal (dokumen)	1	0	0	-	0	0	0	150000000	1	-	0	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.01.004	Sub Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (orang)	60	60	60	30.000.000	60	30.000.000	60	35.000.000	60	35.000.000	60	40.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	100	100	100	217.000.000	100	226.000.000	100	371.500.000	100	707.000.000	100	442.500.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.006	Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan atau kawasan-kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (kawasan)	2	1	3	70.000.000	3	70.000.000	3	80.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	BPBD	Kab. Tbn



Rencana Kerja

		1.05.03.2.02.008	Sub. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya (orang)	0	0	0	-	45	75.000.000	0	-	50	95.000.000	0	-	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.009	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (dok)	0	0	0	0	0	0	0	-	1	100.000.000	0	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.010	Sub. Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam penegndalian operasi darurat bencana (per jenis) kabupaten/kota (orang)	100	100	100	70.000.000	110	75.000.000	120	80.000.000	130	85.000.000	140	90.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.011	Sub Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang Dilegalisasi (dokumen)	0	0	0		0		0		1	150.000.000	0	-	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.012	Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (orang)	0	0	0	0	0	0	50	95.000.000	0	-	25	75.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.014	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi (dokumen)	0	0	0	0	0	-	0	0	1	150.000.000	0	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.015	Sub. Kegiatan Peenyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (jenis)	0	0	0	-	0	0	2	25.000.000	0		2	30.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.016	Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mirigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negaa termasuk rentan di kawasan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (kawasan)	0	50	50	75.000.000	0	0	60	85.000.000	0	-	50	120.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.017	Sub. Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	0	0	1%	2.000.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.500.000	BPBD	Kab. Tbn
	Meningkatnya kualitas layanan SPM Bencana	1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	100	100	100	300.000.000	100	412.000.000	100	424.500.000	100	364.000.000	100	401.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.001	Sub. Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa wabah/penyakit luar biasa (laporan)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	5.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.002	Sub. Kegiatan Renspon Cepat Darurat Becana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDP yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan dokumen kaji cepat	2	2	2	290.000.000	2	300.000.000	2	320.000.000	2	340.000.000	2	280.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.003	Sub. Kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana (orang)	0	0	10	10.000.000	20	12.000.000	20	14.000.000	20	16.000.000	20	18.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.007	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen operasi yang sah dan legal (dokumen)	0	0	0	-	1	100.000.000	0	-	0	-	0	-	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.008	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penangan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur BPBD Kabpten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam spek anajerial dan teknis (orang)	0	0	0	-	0	-	25	75.000.000	0		25	80.000.000	BPBD	Kab. Tbn



Rencana Kerja

		1.05.03.2.03.009	Sub. Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapat distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban encana Kabupaten/Kota (orang)	0	0	0	0	0	0	30	10.500.000	0	-	30	11.000.000	BPBD	Kab. Tbn		
		1.05.03.2.03.010	Sub. Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/ Wabah Penyakit	Jumlah SK peNetapan darurat bencana dan SKPBD yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.000.000	0	-	BPBD	Kab. Tbn		
		1.05.03.2.03.011	Sub. Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Darurat Bencana	Jumlah laporan aktivasi sistem komando penangan darurat bencana kabupaten/kota (laporan)	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	0	-	1	7.000.000	BPBD	Kab. Tbn		
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata (dokumen)	0,0	0,0	1,0	80.000.000	1,0	35.000.000	1,0	226.000.000	1,0	107.000.000	1,0	74.000.000	BPBD	Kab. Tbn		
		1.05.03.2.04.001	Sub. Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	-	BPBD	Kab. Tbn			
		1.05.03.2.04.003	Sub. Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana (dokumen)	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	0	-	1	6.000.000	BPBD	Kab. Tbn		
		1.05.03.2.04.004	Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan inforamsi kebencanaan yang tersedia (dokumen)	0	0	0	0	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	BPBD	Kab. Tbn		
		1.05.03.2.04.008	Sub. Kegiatan Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki kemampuan dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana (R3P) satuan orang	0	0	0	0	0	0	45	75.000.000	0	-	0	-	BPBD	Kab. Tbn		
		1.05.03.2.04.009	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota (dokumen)	0	0	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	BPBD	Kab. Tbn		
		1.05.03.2.04.010	Sub. Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana (RP3) kabupaten/kota yang dilegalkan (dokumen)	1	1	1	80.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	1	55.000.000	BPBD	Kab. Tbn		
		1.05.03.2.04.013	Sub. Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) rencana rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana (RP3) kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian dokumen pengkajiankebutuhan pasca bencana rencana rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana (RP3) kabupaten/kota sampai dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 tahun	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	-	0	-	BPBD	Kab. Tbn		
2	Terwujudnya kualitas tata kelola Pemerintahan di OPD	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD (%)	100	100	100	5.815.327.800	100	5.887.351.791	100	6.083.044.000	100	6.200.044.000	100	6.359.544.000	BPBD	Kab. Tbn



Rencana Kerja

		1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun (dokumen)	3	5	5	11.000.000	5	6.500.000	5	8.000.000	5	10.000.000	5	11.500.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	3	3	6.500.000	3	3.500.000	3	4.500.000	3	5.500.000	3	6.500.000	BPBD	Kab. Tbn

		1.05.01.2.01.07	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	2	2	4.500.000	2	3.000.000	2	3.500.000	2	4.500.000	2	5.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD (%)	100	100	100	4.310.000.000	100	4.356.500.000	100	4.457.500.000	100	4.508.500.000	100	4.559.500.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	14	15	15	4.303.000.000	34	4.353.000.000	34	4.453.000.000	34	4.503.000.000	35	4.553.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.02.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	2	2	2	7.000.000	2	3.500.000	2	4.500.000	2	5.500.000	2	6.500.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD (%)	100	100	100	108.500.000	100	170.000.000	100	139.100.000	100	147.600.000	100	159.100.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1	1	4.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1	1	1	4.000.000	1	46.000.000	1	5.100.000	1	5.600.000	1	6.100.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	8	8	8	40.000.000	8	42.000.000	8	44.000.000	8	46.000.000	8	48.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	2	2	14.000.000	2	16.000.000	2	18.000.000	2	20.000.000	2	22.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan perundangundangan tersedia (paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.07	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)	3	3	3	15.500.000	3	17.000.000	3	19.000.000	3	21.000.000	3	23.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	2	2	2	26.000.000	2	39.000.000	2	42.000.000	2	43.000.000	2	44.000.000	BPBD	Kab. Tbn



Rencana Kerja

		1.05.01.2.06.10	Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dok)	4	4	4	5.000.000	4	5.500.000	4	6.000.000	4	6.500.000	4	7.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD (%)	100	100	100	110.000.000	100	31.407.791	100	100.000.000	100	50.000.000	100	140.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.07.05	Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel tersedia (unit)	0	0	1	40.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	1	70.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.07.06	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	8	8	4	70.000.000	8	31.407.791	8	50.000.000	8	50.000.000	8	70.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor (%)	100	100	100	1.072.444.800	100	1.107.944.000	100	1.143.444.000	100	1.178.944.000	100	1.214.444.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	12	12	2.500.000	12	3.000.000	12	3.500.000	12	4.000.000	12	4.500.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.08.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	3	3	3	32.000.000	3	37.000.000	3	42.000.000	3	47.000.000	3	52.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	12	12	1.037.944.800	12	1.067.944.000	12	1.097.944.000	12	1.127.944.000	12	1.157.944.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor (%)	100	100	100	203.383.000	100	215.000.000	100	235.000.000	100	305.000.000	100	275.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.09.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	12	12	12	133.383.000	12	135.000.000	12	145.000.000	12	155.000.000	12	165.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.09.06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	16	16	16	70.000.000	16	80.000.000	16	90.000.000	16	100.000.000	16	110.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.09.09	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung dan bangunan lainnya yang terpelihara (unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	BPBD	Kab. Tbn



Rencana Kerja